



## Interkulturalitas dalam Pendidikan Multibahasa: Studi Perbandingan di Indonesia dan Negara ASEAN

Dwita Laksmi Rachmawati<sup>1\*</sup>, Ascosenda Ika Rizqi, Usrien Malikha<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Gresik, Kabupaten Gresik, Indonesia

Universitas Merdeka Pasuruan, Kota Pasuruan, Indonesia

Universitas Al-Qolam, Kabupaten Malang, Indonesia

\*Correspondence: [dwitalaksmi@umg.ac.id](mailto:dwitalaksmi@umg.ac.id)

### Article History

Manuscript submitted:

01 Oktober 2025

Manuscript revised:

17 November 2025

Accepted for publication:

20 November 2025

### Keywords

Multilingualism;

Multicultural;

Education;

ASEAN;

Policy

### Abstract

*The phenomenon of multilingualism in the ASEAN region reflects the dynamic interplay between local, national, and international languages, shaping social identities while simultaneously influencing educational policy. This study offers a comparative analysis of multilingual education policies and practices in Indonesia, Singapore, Malaysia, and Thailand, highlighting the integration of regional languages, the use of instructional languages in schools, and the structural challenges faced by each country. Employing a descriptive qualitative approach based on an extensive review of the literature, the research finds that Indonesia's primary obstacles include disparities in educational resources, limited training for regional-language teachers, and the absence of a consistent curriculum for preserving local languages. In contrast, Singapore and Malaysia demonstrate notable success in implementing bilingual policies through structured integration of national languages with English. Thailand, meanwhile, continues to experience substantial gaps between urban and rural areas in the teaching and learning of English. The study's findings underscore that the effectiveness of multilingual education depends on integrated policy frameworks, strengthened teacher training, the development of culturally grounded learning materials, and strategies capable of addressing social and geographical disparities. This research contributes to advancing inclusive and sustainable models of multilingual education across the ASEAN region.*

**How to Cite:** Rachmawati, D.L., Rizqi, A.I., Malikha, U. (2025). Interkulturalitas dalam Pendidikan Multibahasa: Studi Perbandingan di Indonesia dan Negara ASEAN. *MANDALA WIDYA: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(2), 58-68. <https://doi.org/10.71094/mandalawidya.v1i2.91>

## PENDAHULUAN

Kawasan Asia Tenggara (ASEAN) adalah salah satu kawasan paling dinamis di dunia, dengan keragaman budaya dan bahasa yang luar biasa. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura memiliki lebih dari seratus bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mencerminkan kekayaan budaya dan sosial yang sangat beragam. Multibahasa menjadi sebuah fenomena penting yang berperan dalam membentuk identitas sosial, budaya, dan pendidikan di kawasan ini. Dalam konteks pendidikan, pengelolaan multibahasa menjadi tantangan besar, terutama dalam upaya untuk menjaga keberagaman bahasa lokal sambil mengintegrasikannya dengan bahasa nasional dan internasional. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Wulandari dan Nurul (2023:152) yang menjelaskan Literasi multibahasa adalah kemampuan individu untuk membaca, menulis, dan memahami teks dalam lebih dari satu bahasa. Dengan semakin meningkatnya globalisasi dan mobilitas penduduk, penting bagi individu untuk memiliki kemampuan berkomunikasi dalam berbagai bahasa.

Indonesia sebagai negara dengan lebih dari 700 bahasa daerah, peran bahasa Indonesia sebagai lingua franca sangat penting untuk menyatukan berbagai etnis dan kelompok budaya. Namun, di sisi lain, keberagaman bahasa daerah yang sangat besar menimbulkan tantangan tersendiri dalam menjaga kelestariannya. Dalam menghadapi fenomena globalisasi, kebijakan pendidikan di Indonesia, seperti di negara-negara ASEAN lainnya, perlu mengakomodasi kebutuhan untuk menguasai lebih dari satu bahasa, baik bahasa internasional maupun bahasa daerah. Selain itu penguatan kompetensi kewarganegaraan salah satunya melalui *civic literacy* yang mana kita semua memahami bahwa daya baca masyarakat Indonesia sangatlah rendah, hal tersebut pada akhirnya berpengaruh kepada kemampuan analisis seseorang, hal ini juga seperti yang di tulis oleh Winataputra dan Udin (2012) dimana ada 7 kemampuan warga negara yang harus dimiliki diantaranya: civic



knowledge, civic skills, civic disposition, civic confidence, civic competence, civic commitment, dan civic culture. Putri (2023:26) juga menjelaskan bahwa Penguatan kompetensi kewarganegaraan mengarah pada pembentukan warga negara yang mampu menemukan solusi atas masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, dan mengoreksi pemikiran yang salah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Singapura dan Malaysia, dua negara ASEAN dengan kebijakan bilingualisme yang kuat, telah berhasil mengintegrasikan bahasa internasional dengan bahasa nasional dalam sistem pendidikan mereka. Pendekatan mereka mengharuskan siswa untuk menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggris, sebuah kebijakan yang bertujuan tidak hanya untuk mempertahankan bahasa nasional tetapi juga mempersiapkan generasi muda untuk berkompetisi dalam pasar global (Pakir, 1993). Meskipun tantangan di setiap negara berbeda, upaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang mengakomodasi multibahasa di ASEAN menunjukkan adanya upaya bersama dalam menjaga keberagaman budaya dan bahasa.

Artikel ini bertujuan untuk membandingkan kebijakan pendidikan multibahasa di Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya, dengan menyoroti tantangan, kebijakan, serta solusi yang diterapkan dalam pengelolaan pendidikan multibahasa. Studi ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan pendidikan di ASEAN dapat saling mempengaruhi dan bagaimana pendekatan yang berbeda diterapkan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi masing-masing negara.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menganalisis kebijakan pendidikan multibahasa di Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali fenomena sosial yang kompleks, seperti kebijakan multibahasa yang melibatkan interaksi antara bahasa lokal dan bahasa internasional dalam pendidikan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai kebijakan, tantangan, dan praktik pendidikan multibahasa yang diterapkan di negara-negara tersebut.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah studi literatur yang relevan dengan topik multibahasa dan pendidikan di ASEAN. Penelitian ini mengumpulkan data dari artikel jurnal, buku, laporan kebijakan, serta studi kasus yang membahas kebijakan pendidikan multibahasa di Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Beberapa jurnal yang digunakan sebagai referensi utama dalam penelitian ini adalah *Asian Journal of Multilingual and Multicultural Education* dan *ASEAS - Austrian Journal of South-East Asian Studies*, yang menyajikan berbagai perspektif mengenai penerapan pendidikan multibahasa dan multikultural di Indonesia dan ASEAN (Abduh, 2021; Arphattananon, 2021).

Sebagai contoh, Gunawan (2025) mengungkapkan tantangan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan multibahasa di daerah-daerah di Indonesia, seperti di Luwu Timur, yang berfokus pada keterbatasan sumber daya pengajar dan bahan ajar untuk bahasa daerah. Referensi tersebut memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh negara dengan keragaman bahasa yang tinggi, seperti Indonesia, dalam menerapkan kebijakan pendidikan yang inklusif dan berbasis multibahasa.

Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan kebijakan pendidikan multibahasa di Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya. Negara-negara seperti Singapura dan Malaysia yang telah lama menerapkan kebijakan bilingualisme menjadi objek perbandingan yang relevan untuk menganalisis keberhasilan dan tantangan dalam menerapkan pendidikan multibahasa. Pakir (1993) menjelaskan bahwa kebijakan bilingualisme yang diterapkan di Singapura dan Malaysia memungkinkan siswa untuk menguasai bahasa nasional dan bahasa internasional secara bersamaan. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan bagaimana kebijakan serupa diterapkan di Indonesia dan bagaimana negara-negara ASEAN lainnya mengahapinya.

Data yang terkumpul dari studi literatur kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan kebijakan dan praktik pendidikan multibahasa di ASEAN. Fokus utama analisis ini adalah untuk memahami bagaimana negara-negara ASEAN mengintegrasikan bahasa lokal dengan bahasa nasional dan internasional dalam sistem pendidikan mereka. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan multibahasa, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan bagi guru, dan kesulitan dalam mendesain kurikulum yang mengakomodasi keberagaman bahasa daerah.

Ardiyanti dan Pulthinka (2022) mengemukakan bahwa pendidikan berbasis lokal, seperti yang diterapkan di Lombok dengan mengintegrasikan budaya Sasak dalam materi ajar anak usia dini, adalah contoh praktik pendidikan multibahasa yang mendukung pelestarian bahasa daerah sambil memperkenalkan bahasa nasional. Praktik ini dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia dan ASEAN yang menghadapi tantangan serupa

dalam menjaga kelestarian bahasa lokal. Selain itu, analisis ini juga menilai dampak dari kebijakan multibahasa terhadap peningkatan kemampuan komunikasi antarbudaya dan kesadaran multikultural siswa.

Untuk memastikan validitas dan keandalan temuan, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data, yaitu dengan membandingkan berbagai jenis sumber informasi dari artikel jurnal, buku, dan laporan kebijakan yang relevan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir bias dan memastikan bahwa analisis yang dilakukan mencakup berbagai perspektif yang ada. Selain itu, data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber yang kredibel dan telah diuji dalam penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Belarbi dan Belaid (2025) dan Arphattananon (2021), yang membahas kebijakan dan praktik pendidikan multibahasa di ASEAN.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kebijakan dan Praktik Pendidikan Multibahasa di Indonesia

Indonesia, dengan lebih dari 700 bahasa daerah yang tersebar di seluruh nusantara, menghadapi tantangan besar dalam mengelola keberagaman bahasa dalam sistem pendidikannya. Kebijakan pendidikan multibahasa bertujuan untuk mengintegrasikan bahasa daerah dan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama, namun penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan. Pendidikan multibahasa tidak hanya berfokus pada pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, tetapi juga melibatkan pengajaran bahasa daerah yang menjadi bagian dari warisan budaya Indonesia.

Salah satu inisiatif yang dilakukan dalam upaya melestarikan bahasa daerah adalah pengintegrasian bahasa daerah ke dalam kurikulum pendidikan. Sebagai contoh, di Lombok, pendidikan berbasis budaya Sasak diperkenalkan ke dalam materi ajar bagi anak usia dini. Ardiyanti dan Pulthinka (2022) menyoroti bahwa pengajaran bahasa Sasak di sekolah dasar tidak hanya bertujuan untuk memperkenalkan bahasa daerah kepada generasi muda, tetapi juga untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang budaya dan nilai-nilai lokal. Inisiatif ini bertujuan untuk menjaga kelestarian bahasa dan budaya Sasak di tengah tekanan globalisasi yang seringkali mengarah pada dominasi bahasa-bahasa internasional, terutama bahasa Indonesia dan Inggris.

Namun, meskipun ada berbagai usaha untuk memperkenalkan bahasa daerah di sekolah, kenyataannya masih terdapat tantangan yang besar dalam penerapan pendidikan multibahasa di Indonesia. Salah satunya adalah kesenjangan yang mencolok antara kualitas pendidikan di daerah perkotaan dan pedesaan. Di daerah-daerah pedesaan yang lebih terpencil, bahasa daerah sering kali tidak diajarkan secara sistematis di sekolah-sekolah formal. Sebaliknya, bahasa Indonesia lebih dominan digunakan sebagai bahasa pengantar utama dalam pendidikan. Gunawan (2025) menjelaskan bahwa di daerah-daerah seperti Luwu Timur, Sulawesi Selatan, meskipun banyak bahasa daerah yang masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan bahasa daerah di sekolah sangat terbatas. Kurangnya pengajaran bahasa daerah ini menyebabkan generasi muda kehilangan keterampilan berbahasa daerah, yang pada gilirannya mengancam kelestarian bahasa-bahasa tersebut.

Di sisi lain, di kota-kota besar di Indonesia, meskipun terdapat lebih banyak peluang untuk mengintegrasikan bahasa daerah dalam pendidikan, masalah lain yang muncul adalah kurangnya pelatihan yang memadai bagi guru dalam mengajar bahasa daerah. Banyak guru yang tidak dilatih secara khusus untuk mengajar bahasa daerah, yang menyebabkan pengajaran bahasa daerah cenderung terbatas pada penggunaan bahasa tersebut dalam konteks sosial, bukan dalam pengajaran formal yang terstruktur. Hal ini berdampak pada pengembangan kemampuan berbahasa daerah di kalangan siswa yang kurang mendapat kesempatan untuk mempelajari bahasa daerah secara mendalam.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah mencoba mengintegrasikan kebijakan pendidikan multibahasa melalui Kurikulum 2013 yang mencakup pengajaran bahasa daerah sebagai bagian dari mata pelajaran wajib di beberapa daerah. Namun, implementasi kebijakan ini tidak selalu berjalan lancar. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk mendukung pengajaran bahasa daerah, baik dari segi materi ajar maupun pelatihan bagi pengajar. Gunawan (2025) mencatat bahwa di daerah-daerah yang lebih terpencil, fasilitas pendidikan sering kali tidak memadai untuk mendukung pengajaran bahasa daerah. Selain itu, meskipun ada kebijakan penguatan bahasa daerah dalam kurikulum, pengajaran bahasa daerah masih tidak konsisten di seluruh Indonesia, tergantung pada kebijakan daerah masing-masing. Kebijakan pendidikan multibahasa juga seringkali terhambat oleh kenyataan bahwa bahasa Indonesia memiliki status yang dominan sebagai bahasa pengantar utama dalam pendidikan. Meskipun bahasa daerah diakui sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa yang lebih ditekankan dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini tercermin dalam kurikulum yang lebih menekankan pada penguasaan bahasa Indonesia dan, dalam beberapa kasus, bahasa asing seperti bahasa Inggris, sementara pengajaran bahasa daerah seringkali terabaikan, atau hanya diajarkan sebagai mata pelajaran tambahan.

Pendidikan multikultural memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan pendidikan multibahasa di Indonesia. Pendidikan multikultural bertujuan untuk mempromosikan pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman budaya dan bahasa yang ada di Indonesia. Abduh (2021) menekankan pentingnya pendidikan intercultural dalam meningkatkan kemampuan komunikasi antarbudaya bagi mahasiswa Indonesia, dengan harapan dapat mengurangi ketegangan sosial dan meningkatkan toleransi di masyarakat yang multikultural. Dalam konteks pendidikan multibahasa, pendidikan multikultural berfungsi untuk memperkenalkan siswa pada pentingnya mempertahankan bahasa daerah sambil memperkenalkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu.

Namun, meskipun pendidikan multikultural di Indonesia menjadi bagian penting dalam kurikulum, penerapannya masih menghadapi kendala. Salah satunya adalah kurangnya penguatan nilai-nilai multikultural dalam kehidupan sehari-hari siswa, yang dapat memperburuk pengabaian terhadap bahasa daerah. Pendidikan yang hanya terfokus pada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris seringkali mengabaikan pentingnya bahasa daerah dalam membentuk identitas budaya siswa. Pendidikan berbasis budaya lokal, seperti yang diterapkan di Lombok, menjadi contoh yang baik dalam hal ini, di mana materi ajar tidak hanya mengajarkan bahasa daerah, tetapi juga nilai-nilai budaya yang terkait dengan bahasa tersebut (Ardiyanti & Pulthinka, 2022).

Penting untuk dicatat bahwa kebijakan pendidikan multibahasa di Indonesia harus memperhatikan keberagaman sosial dan budaya di setiap daerah. Hal ini karena tidak semua daerah di Indonesia memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas, apalagi pendidikan multibahasa. Di beberapa daerah yang lebih maju secara ekonomi, pengajaran bahasa daerah lebih berkembang, sementara di daerah yang lebih terbelakang, pengajaran bahasa daerah sering kali hanya sekadar formalitas tanpa ada penguatan yang cukup. Untuk menghadapi tantangan ini, beberapa inovasi dalam pengajaran bahasa daerah telah dilakukan. Salah satunya adalah penggunaan teknologi dalam pendidikan bahasa daerah, seperti yang diusulkan oleh Cahyawijaya et al. (2025) melalui pengembangan dataset SEA-VL yang mencakup berbagai bahasa dan budaya di Asia Tenggara. Inovasi teknologi ini berpotensi untuk memberikan akses yang lebih luas kepada siswa di daerah terpencil untuk mempelajari bahasa daerah mereka dengan cara yang lebih menarik dan interaktif.

Selain itu, penggunaan media lokal dan seni sebagai alat bantu pengajaran bahasa daerah juga dapat membantu mengurangi hambatan dalam pengajaran bahasa. Sebagai contoh, di Yogyakarta, penggunaan seni tradisional seperti tari untuk mengajarkan bahasa daerah menjadi metode yang efektif untuk menarik perhatian siswa dan membangkitkan rasa cinta terhadap budaya mereka (Prihadi, Rohidi, & Retnowati, 2019).

Kebijakan pendidikan multibahasa di Indonesia menunjukkan komitmen untuk melestarikan bahasa daerah sekaligus mempromosikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Meskipun ada tantangan besar dalam implementasinya, terutama di daerah-daerah terpencil, beberapa daerah telah berhasil mengintegrasikan bahasa daerah dalam kurikulum pendidikan mereka dengan cara yang inovatif. Ke depan, perlu ada upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas pengajaran bahasa daerah, baik melalui pelatihan guru yang lebih baik maupun pemanfaatan teknologi untuk mendukung pendidikan multibahasa di seluruh Indonesia.

### **Pendidikan Multibahasa di Negara ASEAN Lainnya**

Kebijakan pendidikan multibahasa di negara-negara ASEAN menunjukkan adanya variasi dalam cara tiap negara mengelola keberagaman bahasa di tengah globalisasi. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand telah lama menerapkan kebijakan pendidikan bilingual atau multibahasa, yang mengharuskan siswa untuk menguasai lebih dari satu bahasa sebagai bagian dari kurikulum pendidikan mereka. Praktik pendidikan ini tidak hanya mengajarkan bahasa internasional seperti bahasa Inggris, tetapi juga bahasa nasional yang berfungsi sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan.

**Singapura: Bilingualisme sebagai Kebijakan Nasional**

Singapura, sebagai negara dengan kebijakan bilingualisme yang diterapkan secara ketat, memiliki sistem pendidikan yang mengharuskan setiap siswa menguasai bahasa Inggris sebagai bahasa internasional dan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Pakir (1993) menjelaskan bahwa kebijakan bilingualisme di Singapura bertujuan untuk memastikan bahwa generasi muda tidak hanya dapat berkomunikasi dalam bahasa internasional tetapi juga tetap mempertahankan bahasa nasional mereka untuk tujuan integrasi sosial dan nasionalisme. Di Singapura, bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah, sementara bahasa Melayu diajarkan sebagai bahasa resmi yang mewakili identitas nasional.

Penerapan kebijakan bilingualisme ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan komunikasi internasional siswa, sekaligus memperkuat ikatan sosial antara berbagai kelompok etnis yang ada di Singapura. Para siswa tidak hanya dapat berkompetisi di tingkat global dengan menguasai bahasa Inggris, tetapi juga menghargai dan memahami bahasa serta budaya Melayu. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan sosial yang lebih inklusif dan harmonis. Selain itu, bahasa Melayu, yang merupakan bahasa yang

digunakan oleh mayoritas penduduk asli Singapura, berfungsi sebagai simbol pemersatu dalam masyarakat yang multikultural.

Namun, meskipun kebijakan ini telah sukses dalam meningkatkan keterampilan bahasa siswa, tantangan yang dihadapi oleh Singapura adalah mempertahankan keseimbangan antara bahasa nasional dan bahasa internasional. Dalam beberapa kasus, ada kekhawatiran bahwa bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dapat terpinggirkan oleh dominasi bahasa Inggris, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terbiasa dengan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah Singapura terus berupaya untuk mempromosikan penggunaan bahasa Melayu di ruang publik dan pendidikan agar tidak kehilangan fungsinya sebagai bahasa pengantar utama dalam budaya Singapura (Pakir, 1993).

**Malaysia: Membangun Identitas Nasional melalui Bilingualisme**

Malaysia, seperti Singapura, mengadopsi kebijakan bilingualisme yang mengharuskan siswa menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Di Malaysia, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa resmi dan bahasa pengantar utama di sekolah-sekolah, sementara bahasa Inggris diintegrasikan ke dalam kurikulum sebagai bahasa internasional. Pakir (1993) mencatat bahwa kebijakan bilingualisme di Malaysia tidak hanya berfungsi untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global, tetapi juga untuk memperkuat identitas nasional Malaysia yang berbasis pada bahasa dan budaya Melayu.

Dalam kebijakan ini, bahasa Inggris berfungsi sebagai bahasa kedua yang penting untuk memfasilitasi komunikasi internasional, sedangkan bahasa Melayu berfungsi sebagai simbol kebangsaan dan pemersatu berbagai kelompok etnis yang ada di Malaysia. Dengan adanya kebijakan ini, Malaysia berhasil mempertahankan kekayaan budaya dan bahasa nasional, sembari mempersiapkan generasi muda untuk bersaing di dunia yang semakin global. Pendidikan bilingual ini juga memungkinkan siswa Malaysia untuk mengakses peluang internasional, mengingat pentingnya bahasa Inggris sebagai bahasa global dalam berbagai bidang, termasuk teknologi, ilmu pengetahuan, dan ekonomi.

Namun, di tingkat implementasi, tantangan yang dihadapi Malaysia mirip dengan Singapura, yaitu mempertahankan keberlanjutan penggunaan bahasa Melayu di tengah arus globalisasi yang semakin didominasi oleh bahasa Inggris. Selain itu, kesenjangan antara pengajaran bahasa Melayu di daerah perkotaan dan pedesaan juga menjadi masalah, di mana di daerah pedesaan, bahasa Melayu lebih kental digunakan dalam konteks sosial, tetapi di kota-kota besar, pengaruh bahasa Inggris semakin kuat, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menciptakan tantangan bagi pendidik untuk menjaga relevansi dan keberagaman bahasa dalam kehidupan masyarakat (Pakir, 1993).

**Thailand: Mengatasi Tantangan Pengajaran Bahasa Inggris di Pedesaan**

Di Thailand, meskipun bahasa Thai adalah bahasa pengantar utama, pengajaran bahasa Inggris telah menjadi bagian penting dari sistem pendidikan, mengingat pentingnya bahasa Inggris dalam dunia global. Namun, seperti yang dikemukakan oleh Arphattananon (2021), tantangan besar dalam pendidikan multibahasa di Thailand adalah kesulitan dalam mengintegrasikan bahasa Inggris di daerah pedesaan. Di banyak daerah di luar Bangkok, pengajaran bahasa Inggris seringkali terbatas, dan keterampilan bahasa Inggris siswa cenderung lebih rendah dibandingkan dengan siswa di kota-kota besar.

Salah satu alasan utama dari tantangan ini adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal guru yang terlatih maupun materi ajar yang memadai. Di daerah pedesaan, banyak sekolah yang tidak memiliki pengajar bahasa Inggris yang berkompeten atau cukup pengalaman dalam pengajaran bahasa kedua. Selain itu, rendahnya tingkat perekonomian di daerah-daerah tersebut juga membatasi akses ke teknologi yang dapat mendukung pembelajaran bahasa Inggris yang efektif.

Arphattananon (2021) menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk memperkenalkan bahasa Inggris melalui kebijakan pendidikan nasional, distribusi yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan mengakibatkan ketimpangan dalam pencapaian kompetensi bahasa Inggris di kalangan siswa Thailand. Meskipun demikian, ada beberapa inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk memperbaiki pengajaran bahasa Inggris di pedesaan, seperti pelatihan guru bahasa Inggris dan pengenalan materi ajar berbasis teknologi yang dapat diakses oleh sekolah-sekolah di daerah terpencil.

Penerapan kebijakan multibahasa di Thailand menunjukkan pentingnya kebijakan yang lebih inklusif, yang tidak hanya fokus pada pengajaran bahasa internasional tetapi juga mempertimbangkan keadaan sosial dan ekonomi di berbagai wilayah. Pendidikan bahasa Inggris yang efektif harus diimbangi dengan upaya untuk memastikan bahwa semua siswa, baik di kota besar maupun pedesaan, memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses pengajaran bahasa yang berkualitas.

Pendidikan multibahasa di negara-negara ASEAN menunjukkan adanya upaya yang kuat untuk mengembangkan kompetensi berbahasa siswa di tingkat nasional dan internasional. Singapura dan Malaysia telah berhasil mengimplementasikan kebijakan bilingualisme yang efektif, sementara Thailand menghadapi

tantangan dalam mengintegrasikan bahasa internasional di daerah pedesaan. Meskipun tantangan yang dihadapi setiap negara berbeda-beda, ada kesamaan dalam pentingnya penguasaan bahasa internasional, seperti bahasa Inggris, untuk mempersiapkan siswa menghadapi dunia yang semakin global. Di sisi lain, penguatan bahasa nasional, seperti bahasa Melayu di Malaysia dan bahasa Thai di Thailand, tetap menjadi bagian integral dari kebijakan pendidikan multibahasa di ASEAN.

### **Tantangan dalam Implementasi Pendidikan Multibahasa**

Implementasi pendidikan multibahasa di Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya menghadapi berbagai tantangan yang tidak hanya terkait dengan kebijakan, tetapi juga faktor sosial, budaya, dan infrastruktur pendidikan. Tantangan-tantangan ini muncul dari upaya untuk mengintegrasikan bahasa-bahasa lokal dengan bahasa internasional dalam sistem pendidikan yang sudah mapan. Tantangan tersebut bervariasi tergantung pada konteks sosial, politik, dan ekonomi di masing-masing negara.

#### **Keterbatasan Sumber Daya Pengajaran**

Di Indonesia, tantangan utama dalam implementasi pendidikan multibahasa terletak pada keterbatasan sumber daya pengajaran, terutama di daerah-daerah terpencil. Gunawan (2025) menyoroti bahwa di beberapa daerah, seperti Luwu Timur, Sulawesi Selatan, pengajaran bahasa daerah sangat terbatas karena kekurangan pengajar yang memiliki kompetensi dalam mengajar bahasa daerah tersebut. Keberagaman bahasa lokal yang sangat besar di Indonesia menuntut adanya tenaga pengajar yang tidak hanya menguasai bahasa Indonesia, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengajarkan bahasa daerah secara efektif. Sayangnya, di banyak daerah, guru-guru yang terlatih dalam pengajaran bahasa daerah sangat sedikit.

Keterbatasan ini menyebabkan kesenjangan besar dalam kualitas pendidikan multibahasa yang diberikan. Di satu sisi, di daerah-daerah perkotaan yang lebih maju, pengajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional dapat diakses dengan lebih mudah. Namun, di daerah pedesaan, pengajaran bahasa daerah sering kali terbatas pada penggunaan bahasa tersebut dalam percakapan sehari-hari, tanpa adanya pengajaran yang sistematis dan terstruktur. Hal ini berisiko menghilangkan peluang bagi anak-anak di daerah tersebut untuk belajar bahasa daerah mereka secara mendalam, yang penting untuk melestarikan warisan budaya mereka.

Selain itu, pengajaran bahasa asing, seperti bahasa Inggris, juga menghadapi tantangan serupa, terutama di daerah yang lebih terpencil, di mana akses terhadap materi ajar dan pelatihan guru terbatas. Dengan demikian, salah satu solusi yang perlu dipertimbangkan adalah memperkuat pelatihan bagi guru-guru di daerah-daerah ini, guna meningkatkan kemampuan mereka dalam mengajarkan bahasa lokal dan internasional secara efektif.

#### **Ketidakseimbangan Kurikulum dan Materi Ajar**

Selain keterbatasan sumber daya, ketidakseimbangan dalam kurikulum dan materi ajar juga menjadi hambatan dalam implementasi pendidikan multibahasa di Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Di Indonesia, meskipun bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar utama dalam pendidikan, bahasa daerah seringkali hanya dipelajari di sekolah-sekolah tertentu dan tidak dijadikan bagian dari kurikulum nasional yang wajib. Hal ini membuat pengajaran bahasa daerah seringkali bersifat lokal dan tidak terintegrasi dengan baik dalam sistem pendidikan nasional.

Ardiyanti dan Pulthinka (2022) menunjukkan bahwa di Lombok, misalnya, pendidikan berbasis budaya Sasak diintegrasikan ke dalam kurikulum anak usia dini. Penggunaan bahasa Sasak dalam konteks pembelajaran ini menunjukkan betapa pentingnya materi ajar yang mencakup aspek budaya lokal. Namun, meskipun ini adalah langkah positif, pengembangan materi ajar yang menggabungkan bahasa daerah dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing sering kali terhambat oleh keterbatasan dana dan kurangnya dukungan dari kebijakan pendidikan yang lebih luas.

Di negara-negara ASEAN lain seperti Thailand, Arphattananon (2021) mengamati bahwa meskipun kebijakan pendidikan multibahasa ada, integrasi bahasa Inggris ke dalam kurikulum pendidikan tidak merata, terutama di daerah pedesaan. Di Thailand, meskipun ada kebijakan nasional untuk mengajarkan bahasa Inggris, keberhasilan implementasinya masih terbatas, terutama di daerah yang lebih terpencil, di mana pengajaran bahasa Inggris sering kali tidak sesuai dengan standar yang diinginkan. Selain itu, materi ajar yang kurang relevan dan tidak berorientasi pada konteks lokal membuat pengajaran bahasa Inggris menjadi kurang efektif di beberapa daerah.

#### **Perbedaan Sosial dan Ekonomi Antar Daerah**

Perbedaan sosial dan ekonomi antar daerah juga merupakan tantangan signifikan dalam implementasi pendidikan multibahasa. Di Indonesia, wilayah yang lebih maju secara ekonomi, seperti Jakarta dan Bali, memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan multibahasa dibandingkan dengan daerah-daerah yang lebih



terpencil, seperti Papua atau Luwu Timur. Gunawan (2025) menunjukkan bahwa di daerah-daerah yang lebih terpencil, pengajaran bahasa daerah sangat tergantung pada keadaan sosial dan ekonomi lokal, yang seringkali kurang mendukung keberlanjutan program pendidikan bahasa. Hal ini memperburuk kesenjangan pendidikan yang sudah ada antara daerah urban dan rural.

Kesenjangan sosial dan ekonomi ini juga terlihat dalam kesulitan akses terhadap teknologi pendidikan, yang semakin menjadi faktor penting dalam mendukung pembelajaran multibahasa. Banyak daerah di Indonesia yang tidak memiliki akses internet yang memadai atau perangkat elektronik yang dibutuhkan untuk pembelajaran berbasis teknologi. Di Singapura dan Malaysia, di mana infrastruktur pendidikan dan teknologi lebih berkembang, pengajaran bilingualisme dapat diterapkan dengan lebih efisien dan merata di seluruh wilayah (Pakir, 1993). Namun, di Indonesia dan Thailand, kesenjangan ini menjadi kendala besar dalam menerapkan pendidikan multibahasa secara merata.

### **Persepsi Masyarakat terhadap Pendidikan Multibahasa**

Tantangan lain yang sering dihadapi dalam implementasi pendidikan multibahasa adalah persepsi masyarakat terhadap pentingnya bahasa daerah dalam pendidikan. Di Indonesia, beberapa masyarakat lebih cenderung untuk memprioritaskan penguasaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris karena dianggap lebih relevan untuk kemajuan ekonomi dan mobilitas sosial. Abduh (2021) mengungkapkan bahwa mahasiswa Indonesia yang mempelajari bahasa asing, terutama bahasa Inggris, seringkali mendapat perhatian lebih dalam dunia kerja dan pendidikan tinggi. Hal ini membuat pendidikan multibahasa seringkali dianggap sebagai suatu hal yang tidak terlalu penting, terutama bagi masyarakat yang menganggap bahasa daerah sebagai bahasa yang terbatas pada konteks lokal saja.

Penting untuk mengubah persepsi ini dengan memperkenalkan nilai penting dari keberagaman bahasa dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Pendidikan multibahasa dapat menjadi sarana untuk memperkuat identitas budaya dan memperkenalkan dunia internasional kepada siswa tanpa mengorbankan keberagaman bahasa yang ada. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan multibahasa harus didukung oleh kampanye kesadaran yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penguasaan berbagai bahasa dalam memperkaya pengalaman belajar dan memperkuat hubungan antarbudaya.

### **Keterbatasan Kebijakan Pemerintah**

Meskipun pemerintah Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya telah mengadopsi berbagai kebijakan yang mendukung pendidikan multibahasa, implementasi kebijakan tersebut seringkali tidak konsisten dan kurang terkoordinasi. Belarbi dan Belaid (2025) mencatat bahwa meskipun kebijakan multibahasa telah diterapkan di beberapa negara ASEAN, pengelolaan kebijakan ini seringkali terganggu oleh perubahan pemerintahan, ketidakpastian anggaran, dan kurangnya komitmen untuk memberikan pelatihan kepada tenaga pendidik. Pemerintah Indonesia, meskipun telah mengembangkan kurikulum yang mencakup pengajaran bahasa daerah, belum cukup memberi perhatian pada penguatan sistem evaluasi yang dapat mengukur keberhasilan kebijakan ini secara efektif.

Secara keseluruhan, tantangan dalam implementasi pendidikan multibahasa di Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya mencerminkan kompleksitas dari sistem pendidikan yang mencoba mengakomodasi keberagaman bahasa dalam masyarakat. Kendala yang dihadapi tidak hanya berasal dari faktor internal sistem pendidikan itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan politik yang ada di setiap negara. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan multibahasa memerlukan upaya kolektif dari pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan untuk menciptakan sistem yang inklusif dan merata.

### **Pelajaran yang Dapat Diambil dari ASEAN**

Pendidikan multibahasa di kawasan ASEAN, dengan keberagaman bahasa dan budaya yang sangat tinggi, menawarkan berbagai pelajaran penting bagi Indonesia dalam mengelola keragaman bahasa lokal dan bahasa internasional dalam sistem pendidikan. Negara-negara di ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Indonesia, memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengelola pendidikan multibahasa, namun masing-masing negara menunjukkan keberhasilan dan tantangan yang dapat dijadikan pembelajaran.

#### **Kebijakan Bilingualisme yang Terintegrasi di Singapura dan Malaysia**

Singapura dan Malaysia merupakan dua negara di ASEAN yang telah berhasil mengimplementasikan kebijakan pendidikan bilingual yang terintegrasi, yang mengharuskan siswa untuk menguasai lebih dari satu bahasa. Di Singapura, kebijakan bilingualisme menggabungkan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional dan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Pakir (1993) mencatat bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa agar siap menghadapi tantangan global sambil mempertahankan

identitas nasional. Keberhasilan Singapura dalam menerapkan bilingualisme juga tercermin dalam kemampuan komunikasi internasional yang tinggi di kalangan siswa dan masyarakat.

Demikian juga di Malaysia, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa nasional yang digunakan dalam pendidikan, sementara bahasa Inggris diintegrasikan dalam kurikulum untuk meningkatkan kompetensi bahasa internasional siswa. Pakir (1993) menjelaskan bahwa Malaysia memandang bahasa Inggris sebagai bahasa yang sangat penting dalam dunia global. Dengan kebijakan ini, Malaysia berhasil mempertahankan keberagaman bahasa nasional dan etnis sambil memberikan akses kepada siswa untuk menguasai bahasa internasional yang menjadi kunci untuk mobilitas sosial dan ekonomi.

Pelajaran penting yang dapat diambil dari Singapura dan Malaysia adalah pentingnya kebijakan yang terintegrasi antara bahasa nasional dan bahasa internasional dalam pendidikan. Indonesia, dengan lebih dari 700 bahasa daerah, bisa belajar dari model ini untuk mengintegrasikan pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama di sekolah, sembari memfasilitasi pelestarian bahasa daerah melalui kurikulum yang mendukung keberagaman bahasa.

### ***Pengajaran Bahasa Inggris di Thailand dan Tantangan di Daerah Pedesaan***

Thailand merupakan contoh negara ASEAN yang memiliki kebijakan untuk memperkenalkan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua dalam sistem pendidikan. Arphattananon (2021) menjelaskan bahwa meskipun ada kebijakan nasional untuk mengajarkan bahasa Inggris di sekolah-sekolah, implementasinya menghadapi tantangan besar di daerah pedesaan. Di kota-kota besar seperti Bangkok, pengajaran bahasa Inggris relatif berhasil, tetapi di daerah-daerah terpencil, keterbatasan sumber daya, kurangnya tenaga pengajar yang terlatih, dan ketergantungan pada materi ajar yang tidak relevan membuat pengajaran bahasa Inggris menjadi tidak efektif.

Pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman Thailand adalah pentingnya pemerataan sumber daya pendidikan di seluruh wilayah, terutama di daerah pedesaan. Hal ini sangat relevan bagi Indonesia yang memiliki banyak daerah terpencil, di mana pengajaran bahasa daerah dan bahasa Indonesia perlu diperkuat agar anak-anak di daerah-daerah tersebut dapat belajar dengan baik. Kebijakan yang menysasar kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan perlu diperhatikan, terutama dalam hal pelatihan guru dan penyediaan materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

### ***Integrasi Budaya Lokal dalam Pendidikan di Indonesia***

Indonesia memiliki keragaman bahasa yang sangat besar, yang mencakup lebih dari 700 bahasa daerah. Mengintegrasikan bahasa daerah dalam sistem pendidikan nasional menjadi tantangan tersendiri. Ardiyanti dan Pulthinka (2022) menyoroti inisiatif di Lombok yang melibatkan pengajaran bahasa Sasak dalam materi ajar di sekolah-sekolah untuk anak usia dini. Meskipun inisiatif ini positif, pengajaran bahasa daerah di Indonesia masih terbatas pada daerah-daerah tertentu dan belum menjadi bagian integral dari kurikulum nasional.

Pentingnya integrasi budaya lokal dalam pendidikan dapat dilihat dalam contoh dari negara ASEAN lainnya, seperti di Malaysia, yang berhasil mengintegrasikan bahasa dan budaya Melayu dalam sistem pendidikan mereka. Di Indonesia, pelajaran yang dapat diambil adalah pentingnya mengembangkan kurikulum yang tidak hanya berfokus pada bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, tetapi juga memasukkan bahasa daerah sebagai bagian dari pembelajaran yang dapat memperkaya pengalaman siswa dalam memahami identitas budaya mereka.

Kebijakan yang mendukung pelestarian bahasa daerah dalam pendidikan formal perlu diperkuat, dengan memperkenalkan kurikulum yang mengakomodasi keberagaman bahasa, baik di tingkat dasar maupun lanjutan. Hal ini tidak hanya akan membantu melestarikan bahasa-bahasa daerah, tetapi juga memberikan siswa kesempatan untuk menghargai dan mempelajari kekayaan budaya yang ada di Indonesia.

#### ***Pentingnya Pelatihan Guru dan Pengembangan Materi Ajar***

Gunawan (2025) menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama dalam implementasi pendidikan multibahasa di Indonesia adalah kurangnya tenaga pengajar yang terlatih dalam mengajarkan bahasa daerah maupun bahasa internasional. Di banyak daerah terpencil, pengajaran bahasa daerah sering kali dilakukan secara informal atau tidak terstruktur, sedangkan pengajaran bahasa internasional, seperti bahasa Inggris, sering kali tidak optimal karena keterbatasan pelatihan guru dan akses terhadap materi ajar yang berkualitas.

Negara-negara seperti Singapura dan Malaysia memiliki kebijakan pelatihan guru yang komprehensif untuk memastikan bahwa tenaga pendidik dapat mengajar kedua bahasa dengan efektif. Di Singapura, misalnya, para guru dilatih untuk mengajar bahasa Inggris dan bahasa Melayu secara bersamaan, dengan pendekatan yang mengedepankan metode pengajaran yang adaptif dan relevan dengan perkembangan global (Pakir, 1993).



Indonesia dapat mengambil pelajaran dari kebijakan ini dengan meningkatkan pelatihan bagi guru di daerah terpencil untuk mengajarkan bahasa daerah dan bahasa internasional secara lebih efektif.

Pengembangan materi ajar juga menjadi aspek penting dalam pendidikan multibahasa. Indonesia perlu mengembangkan materi ajar yang tidak hanya berfokus pada pengajaran bahasa Indonesia, tetapi juga bahasa daerah yang dapat diakses di seluruh wilayah. Hal ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal untuk menghasilkan materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan budaya lokal mereka.

### ***Pendidikan Multikultural sebagai Sarana Mempererat Hubungan Antar Etnis***

Selain pengajaran bahasa, pendidikan multikultural juga berperan penting dalam mempromosikan toleransi dan pemahaman antarbudaya. Di negara-negara ASEAN yang sangat beragam, seperti Malaysia dan Singapura, pendidikan multikultural menjadi bagian integral dari sistem pendidikan mereka. Kusmayadi, Sirait, dan Anwar (2025) mengungkapkan bahwa pendidikan multikultural yang melibatkan berbagai elemen budaya, termasuk bahasa, dapat memperkuat kompetensi komunikasi antarbudaya, yang penting untuk menjaga keharmonisan sosial di tengah keragaman.

Indonesia, dengan keberagaman etnis dan budaya yang melimpah, dapat mengambil pelajaran dari kebijakan ini dengan memperkuat pendidikan multikultural yang tidak hanya berfokus pada bahasa, tetapi juga nilai-nilai budaya lokal yang dapat mempererat hubungan antar kelompok etnis. Pendidikan multikultural yang inklusif dan berbasis budaya lokal akan membantu siswa menghargai keberagaman dan membangun masyarakat yang lebih toleran dan harmonis.

Dari pengalaman negara-negara ASEAN dalam menerapkan pendidikan multibahasa, Indonesia dapat belajar banyak mengenai bagaimana mengelola keberagaman bahasa dengan bijaksana. Dengan memperkuat kebijakan yang mengintegrasikan bahasa daerah dan bahasa internasional dalam pendidikan, meningkatkan pelatihan bagi tenaga pendidik, dan mengembangkan kurikulum yang relevan dengan keberagaman budaya lokal, Indonesia dapat memperbaiki implementasi pendidikan multibahasa yang lebih merata dan inklusif di seluruh wilayah.

## **KESIMPULAN**

Pendidikan multibahasa di kawasan ASEAN mencerminkan keberagaman sosial, budaya, dan bahasa yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi negara-negara di kawasan ini. Melalui studi perbandingan antara Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada kesamaan dalam tantangan yang dihadapi, seperti integrasi bahasa daerah dan pendidikan multikultural, setiap negara memiliki pendekatan unik yang dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan kebijakan masing-masing.

Di Indonesia, tantangan terbesar dalam implementasi pendidikan multibahasa terletak pada ketidakmerataan sumber daya pendidikan, terutama di daerah terpencil. Kurangnya pelatihan guru yang menguasai bahasa daerah dan internasional, serta minimnya materi ajar yang mendukung keberagaman bahasa, menghambat implementasi kebijakan pendidikan multibahasa secara efektif. Di sisi lain, negara-negara seperti Singapura dan Malaysia telah berhasil menerapkan kebijakan bilingualisme dengan sukses, berkat kebijakan yang mendukung penggunaan bahasa kedua dalam sistem pendidikan mereka. Keberhasilan ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang mengintegrasikan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah serta bahasa internasional, tanpa mengabaikan keberagaman budaya yang ada.

Pendidikan multikultural yang melibatkan pengajaran bahasa lokal dan internasional sangat penting untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi dunia global. Negara-negara ASEAN seperti Singapura dan Malaysia menunjukkan bahwa dengan kebijakan yang tepat dan pelatihan guru yang memadai, pendidikan multibahasa dapat memperkuat kemampuan komunikasi antarbudaya dan mempererat hubungan antar etnis di masyarakat.

Untuk itu, Indonesia perlu memperkuat kurikulum pendidikan yang mengakomodasi keberagaman bahasa, meningkatkan pelatihan guru, serta melibatkan komunitas lokal dalam pengembangan materi ajar yang relevan. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat menciptakan sistem pendidikan multibahasa yang inklusif, merata, dan menghargai kekayaan budaya lokal, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing siswa dalam konteks global.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abduh, A. (2021). *Enhancing students' intercultural communication knowledge through English department students in Indonesia*. Asian Journal of Multilingual and Multicultural Education, 9(1), 1–15.  
<https://doi.org/10.55317/ajmme.v9i1.12>

- Ardiyanti, S., & Pulthinka Nur Hanip, S. (2022). *Pendidikan Nilai Melalui Bahan Ajar Muatan Lokal Budaya Sasak Pada Anak Usia Dini Di Lombok*. Early Childhood: Jurnal Pendidikan, 6(2), 50–64. <https://doi.org/10.35568/earlychildhood.v6i2.2476>
- Arphattananon, T. (2021). *Multi-lingual and multicultural education in globalizing Southeast Asia*. ASEAS - Austrian Journal of South-East Asian Studies, 14(2), 149–153. <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-0064>
- Belarbi, K., & Belaid, L. (2025). *Multilingual practices in the linguistic landscape: Insights into linguistic repertoires and language policy*. International Journal of Multilingual Education, 26(1), 42–54. <https://doi.org/10.16923/ijme.v26i1.42>
- Cahyawijaya, S., dkk. (2025). *Crowdsourcing, Crawl, or Generate? Creating SEA-VL, a Multicultural Vision-Language Dataset for Southeast Asia*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2503.07920>
- Cai, Q.-Y. (2025). *Formative quizzes in L2 Chinese classrooms: Effects on summative assessment outcomes*. International Journal of Multilingual Education, 26(1), 72–92. <https://doi.org/10.16923/ijme.v26i1.72>
- Carley Rizzuto, K., Steiner, L. M., & Zambak, V. S. (2025). *A music and movement program to enhance multilingual learners' phonemic awareness skills*. International Journal of Multilingual Education, 26(1), 55–71. <https://doi.org/10.16923/ijme.v26i1.55>
- Deterding, D. (2020). *Intercultural communication in Asia: Education, language and values*. Asian Englishes, 45(10), 1–15. <https://doi.org/10.1080/13488678.2019.1640456>
- Gevorgyan, S. (2024). *The Use of Adaptive Learning Technologies in e-Learning for Inclusive Education: A Systematic Review*. 2, 90–107.
- Gunawan, W. (2025). *The challenges of implementing multilingual education in Luwu Timur, South Sulawesi*. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 45(10), 1–15. <https://doi.org/10.1080/01434632.2025.2002333>
- Harahap, N. S. G. (2024). *Metode penelitian: Panduan komprehensif*. Media Penerbit Indonesia. <https://repository.mediapenerbitindonesia.com/358/1/7.%20K%2073%20-%20Metode%20Penelitian%20Panduan%20Komprehensif.pdf>
- Ilyasin, M. (2019). *Inovasi Manajemen Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Samarinda*. Fenomena, 11(2), 91–106. <https://doi.org/10.21093/fj.v11i1.1917>
- Karoso, S. (2024). *Transformation of Cultural Arts Education in Indonesia: Combining Technological Innovation and Adaptability in the Era of Globalisation*. Education and Human Development Journal, 9(1), 31–39. <https://doi.org/10.33086/ehdj.v9i1.5673>
- Kurniawan, L., dkk. (2024). *Green Education Untuk Mengembangkan Karakter Entrepreneurship Siswa/i Lembaga Bimbingan Belajar Pelajar D'King Study*. 2(2), 1–9.
- Kusmayadi, I. M., Sirait, R. A., & Anwar, R. K. (2025). *The Green ASEAN Culture Festival as a strategic educational instrument for enhancing intercultural communicative competence*. Journal of Intercultural Communication, 25(3), 1185–1201. <https://doi.org/10.36923/jicc.v25i3.1185>
- Lee, H. Y. (2023). *Language and education policies in Southeast Asia*. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 45(10), 1–15. <https://doi.org/10.1080/01434632.2025.2002333>
- Lider, G., & Dantes, N. (2019). *Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Kontekstual Bermuatan Nilai Budaya dan Karakter Bangsa terhadap Hasil Belajar Ditinjau dari Sikap Demokrasi Pendidikan Kewarganegaraan*. Indonesian Values and Character Education Journal, 1(1), 12. <https://doi.org/10.23887/ivcej.v1i1.20301>
- Linda, F. K. R. (2020). *Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Sekolah Dasar*. SHEs: Conference, 3(3), 2013–2015.
- Luo, C. (2024). *Linguistic diversity in Southeast Asia and its impact on multilingual education*. International Journal of Frontiers in Sociology, 6(1), 61–66. <https://doi.org/10.25236/IJFS.2024.060112>
- Moussons: Recherche en sciences humaines sur l'Asie du Sud-Est. (2025). *Local languages and education in Southeast Asia*. Moussons, 45, 7–25. <https://doi.org/10.4000/147jm>
- Mulianah, B. (2023). *Curriculum Of Islamic Education in The Context of Free Learning: A Critical Study*. November, 865–882. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i04.7388>
- Nastiti, D., & Sari, L. A. (2023). *Pengembangan Buku Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Berwawasan Nusantara Untuk SD Kelas III Guna Memperkuat Profil Pelajar Pancasila*. Prima Magistra: Jurnal Ilmiah Kependidikan, 4(4), 568–578. <https://doi.org/10.37478/jpm.v4i4.3138>
- Nawir, D., dkk. (2025). *Metode penelitian ilmiah*. PT. Global Teras Fana. [https://www.researchgate.net/publication/395688208\\_Metode\\_Penelitian\\_Iliah](https://www.researchgate.net/publication/395688208_Metode_Penelitian_Iliah)
- Pakir, A. (1993). *Developments in bilingual education in ASEAN: Language policies and practices in Singapore, Malaysia, and Brunei Darussalam*. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 25(7), 1–15. <https://doi.org/10.1080/07908319309525152>

- Pakpahan, A. F., dkk. (2021). *Metodologi penelitian ilmiah*. Yayasan Kita Menulis. <https://repository.unai.edu/id/eprint/656/1/%5BIII.A.1.a.2.10%5D%20FullBook%20Metodologi%20Penelitian%20Ilmiah.pdf>
- Pelila, J. R. O., Basilio, G. B., Guiniguin, R. M. S., & Daongan, A. K. (2025). *Bilingual education in Asia: Language use, academic impact, and recommendations for effective practices*. Journal of Multidisciplinary Research and Development, 2(1), 69–82. <https://doi.org/10.56916/jmrd.v2i1.1021>
- Prihadi, B., Rohidi, T. R., & Retnowati, T. H. (2019). *The Existence and Practice of Art For Children (AFC) Yogyakarta as A Non-Formal Art Education*. Harmonia: Journal of Arts Research and Education, 18(2), 143–152. <https://doi.org/10.15294/harmonia.v18i2.17052>
- Putri, T. L. D., Adha, M. M., & Putri, D. S. (2023). Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Literasi Baca dan Kompetensi Kewarganegaraan Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Pedagogi: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(1), 24–29. <https://doi.org/10.56393/pedagogi.v3i1.1067>
- Rahmawati, A. N., Subiyantoro, S., & Widiyastuti, E. (2020). *The Role of Art Education Through the Learning of Traditional Dance in Elementary School*. 421(Icalc 2019), 8–14. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200323.002>
- Saearani, M. F. T. bin. (2014). *Non-Formal Education As Culture Transformation Agent Towards the Development of Clasical Court Dance in Yogyakarta, Indonesia*. International Journal of Education and Research, 2(5), 43–52. <https://media.neliti.com/media/publications/298402-the-legitimacy-of-classical-dance-gagrag-ad94590a.pdf>
- Sakti, S. A., Endraswara, S., & Rohman, A. (2024). *Integrating Local Cultural Values into Early Childhood Education to Promote Character Building*. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 23(7), 84–101. <https://doi.org/10.26803/ijlter.23.7.5>
- Salem-Gervais, N. (2025). *Local languages and education in Southeast Asia: Framing the special issue*. Moussons, 45, 7–25. <https://doi.org/10.4000/147jm>
- Santos, R. C. (2025). *The analysis of intercultural bilingual education in indigenous communities of the Amazon region*. Journal of Intercultural Communication, 25(2), 1138–1152. <https://doi.org/10.36923/jicc.v25i2.1138>
- Setyowati, N. (2022). *Interkoneksi agama, sosial dan budaya dalam pendidikan Islam*. Journal of Islamic Education and Innovation, 3(1), 56–63. <https://doi.org/10.26555/jiei.v3i1.6086>
- Suryadmaja, G. (2025). *Sosiologi Seni: Memahami Interaksi Antara Seni dan Masyarakat*. In D. P. Ningsih (Ed.), PT Rajawali Media Utama (I). PT Rajawali Media Utama.
- Suryadmaja, G., Ardiyansyah, L., & Purwati, D. (2015). *Mengoptimalkan Hasil Belajar Mahasiswa Melalui Pengembangan Media Rumah Cerita Pada Mata Kuliah Tata Teknik Pentas Prodi Pendidikan Sendoritasik UNU NTB*. Jurnal Ilmiah Mandala Education, 1(2), 290–301. <https://doi.org/MENGOPTIMALKAN HASIL BELAJAR>
- Syahza, A. (2021). *Metodologi penelitian*. Universitas Riau. <https://almasdi.staff.unri.ac.id/files/2021/09/Buku-Metopel-2021-ISBN-978-623-255-107-7.pdf>
- Trudell, B. (2014). *The multilingual education (MLE) network phenomenon: Advocacy and action for minoritized language communities*. Multilingual Education, 4(1), 17. <https://doi.org/10.1186/s13616-014-0017-y>
- Winataputra, Udin Saripudin. 2012. Jati Diri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi: Suatu Kajian Konseptual dalam Konteks Pendidikan IPS. Jurnal Pendidikan Program Pascasarjana, Vol. 1 Nomor 1, Februari 2012, hal. 3975.
- Wulandari Arifin, N., & Nurul Hidayah, A. (2023). Evaluasi Program Pembelajaran Literasi Multibahasa di Sekolah Dasar. *Buletin Ilmiah Pendidikan*, 2(1), 151–157. <https://doi.org/10.56916/bip.v2i1.703>
- Zohdi, A., Ali, L. U., & Ibrahim, N. (2023). *The education values and motivation behind violence in the tradition of the Sasak Tribe in Indonesia*. ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia, 8(1), 102–115. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v8i1.26670>
- Zsögön, M. C. (2025). *Between assimilation and recognition of Indigenous Peoples: The role of intercultural bilingual education in Latin America*. International Journal of Social Pedagogy, 14(1), 2. <https://doi.org/10.14324/111.444.ijsp.2025.v14.x.002>